

Judul : Bangga anaknya jadi WNA, penerima LPDP kudu jelaskan status WNI
Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Bangga Anaknya Jadi WNA

Penerima LPDP Kudu Jelaskan Status WNI

SENAYAN menyoroti polemik yang melibatkan *influencer* Dwi Sasetyaningtyas alias DS setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki paspor Inggris untuk anaknya viral di media sosial (medsos). Pernyataan tersebut berpotensi memberikan pesan kurang baik sebagai bentuk ketidakbanggaan terhadap status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo meminta Dwi Sasetyaningtyas menjelaskan secara terbuka sikap dan status kewarganegaraannya. Klarifikasi tersebut penting dilakukan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan persepsi negatif terhadap bangsa dan negara.

"Kami berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia," ujar Yanuar dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Diketahui, Dwi Sasetyaningtyas mengunggah video yang memamerkan dia telah mendapatkan surat dari Home Office Britania Raya atau Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Inggris soal kewarganegaraan Inggris bagi anak keduanya.

Dalam video tersebut, dia mengungkapkan: "*I know the world seems unfair*. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu," ucapnya.

Yanuar menegaskan, menjadi warga negara merupakan hak asasi setiap orang. Tapi, status kewarganegaraan memiliki konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dipahami. Untuk itu, Kementerian Hukum (Kemendik) kudu memastikan aspek kewarganegaraan yang bersangkutan.

Apabila dia tidak lagi ingin menjadi WNI, maka hal tersebut merupakan pilihan pribadi yang harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Tapi, jika masih ingin menjadi WNI, maka yang bersangkutan perlu menyampaikan pernyataan resmi kepada Kemendik," tegas politikus PKS ini.

Yanuar menambahkan, fenomena yang berkembang saat ini justru menunjukkan banyak



Yanuar Arif Wibowo

warga negara asing, termasuk anak-anak hasil perkawinan campuran dari berbagai negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang mengajukan permohonan menjadi WNI. Bahkan, dia pernah membantu proses advokasi anak berkewarganegaraan Inggris yang ingin memperoleh status sebagai WNI.

Karena itu, masyarakat harus tetap bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. "Indonesia merupakan negara besar yang memiliki potensi dan daya tarik kuat di mata dunia," kata Yanuar.

Selain itu, dia mengingatkan diaspora Indonesia seharusnya berperan memberikan kontribusi positif bagi tanah air, baik melalui pengetahuan, pengalaman, maupun jejaring internasional. Bukan justru menyampaikan narasi yang dapat merendahkan citra bangsa.

"Diaspora bukan berarti menjauh dari Indonesia. Justru harus memberikan kontribusi dan membawa manfaat bagi kemajuan bangsa," tandasnya.

Senada, anggota Komisi X DPR Habib Syarif mendesak Pemerintah memperketat proses seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Langkah ini dipicu oleh kontroversi di media sosial terkait pernyataan *influencer* Dwi Sasetyaningtyas, mantan penerima beasiswa yang dinilai tidak mencerminkan nasionalisme.

Habib menegaskan, setiap rupiah yang dikeluarkan LPDP merupakan uang negara yang membawa konsekuensi tanggung jawab moral dan hukum yang besar. Insiden ini menjadi alarm bagi Pemerintah agar integritas dan komitmen kebang-

saan calon penerima beasiswa harus diuji lebih dalam, bukan sekadar kecakapan akademik.

"Kami meminta Pemerintah memperketat seleksi LPDP," tegas politikus PKB ini.

Dia menilai, pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan. Padahal seharusnya penerima beasiswa harus memiliki integritas dan komitmen kuat karena ini menggunakan uang negara.

Habib menjelaskan, LPDP merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anak bangsa. Peningkatan kualitas SDM tersebut harusnya tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan tetapi juga bisa memberikan kemanfaatan lebih besar bagi bangsa dan negara.

"Saat ini kondisi bangsa belum seperti yang mereka idealkan, tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaiki, bukan malah menunjukkan penyesalan sebagai WNI," kata Habib. ■ TIF